



---

## Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

Muhd. Ichsan Zafnil

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: [muhd.icshan.mi@gmail.com](mailto:muhd.icshan.mi@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a strategic instrument of regional fiscal policy that functions as a tool for planning, implementing, and evaluating regional government performance. The effectiveness of the APBD is not measured solely by the level of budget absorption, but also by the ability of expenditure allocation and realization to support the achievement of regional development goals and the improvement of community welfare. This study aims to analyze the effectiveness of the Kuantan Singingi Regency APBD for the 2025 Fiscal Year, focusing on the regional expenditure structure, budget realization rate, and its alignment with regional development priorities. This research uses an empirical-juridical method with a descriptive-analytical and evaluative approach. Data was obtained through a document study of the Kuantan Singingi Regency APBD for 2025, budget realization reports published by the Ministry of Finance through the Directorate General of Fiscal Balance, and supported by secondary data from media reports and regional policy documents related to financial management. Effectiveness analysis was conducted by comparing realization against budget targets, examining the composition of regional expenditure – particularly between operational expenditure and capital expenditure – and assessing its implications for fiscal sustainability and development output. The results show that the effectiveness of the Kuantan Singingi Regency APBD for 2025 still faces significant structural problems. Regional expenditure is dominated by employee expenditure and expenditure on goods and services, while the allocation for capital expenditure is relatively limited. This condition is exacerbated by the low level of budget realization in the current period and the fiscal burden of payment arrears from the previous fiscal year. This indicates that the APBD has not yet fully functioned as a result-oriented (outcome) development instrument, but still tends to be administrative and routine. This study concludes that improving APBD effectiveness requires strengthening performance-based planning and budgeting, restructuring regional expenditure priorities, and increasing transparency and oversight in regional financial management.*

**Keywords:** Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Budget Effectiveness, Regional Expenditure, Regional Financial Management, Kuantan Singingi Regency.

### ABSTRAK

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Efektivitas APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan alokasi dan realisasi belanja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan*

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dengan menitikberatkan pada struktur belanja daerah, tingkat realisasi anggaran, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dan evaluatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta didukung oleh data sekunder dari pemberitaan media dan dokumen kebijakan daerah terkait pengelolaan keuangan. Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target anggaran, mengkaji komposisi belanja daerah – khususnya antara belanja operasional dan belanja modal serta menilai implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan output pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 masih menghadapi persoalan struktural yang signifikan. Belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sementara alokasi belanja modal relatif terbatas. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat realisasi anggaran pada periode berjalan serta adanya beban fiskal berupa tunda bayar dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa APBD belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome), melainkan masih cenderung bersifat administratif dan rutin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas APBD memerlukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penataan kembali prioritas belanja daerah, serta peningkatan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Efektivitas Anggaran, Belanja Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Kuantan Singingi.

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi strategis sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam kerangka otonomi daerah, APBD menjadi cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan direalisasikan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Efektivitas APBD memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD yang efektif seharusnya mampu mengarahkan belanja publik pada sektor-sektor prioritas yang berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi persoalan klasik berupa dominasi belanja operasional, rendahnya kualitas perencanaan, serta lemahnya keterkaitan antara alokasi anggaran dengan hasil pembangunan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana APBD benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan daerah (Sutrisno, Perawati, Mariska, Aliyah, & Andriani, 2024).

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Riau juga dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Tahun Anggaran 2025. Struktur APBD Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan kecenderungan tingginya alokasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sementara porsi belanja modal relatif terbatas. Pola belanja seperti ini berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan program-program produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Srisaparmi, Frinaldi, Asnil, & Putri, 2025). Dengan demikian, analisis terhadap efektivitas APBD menjadi penting untuk menilai arah kebijakan fiskal daerah secara komprehensif.

Selain persoalan struktur belanja, tingkat realisasi anggaran juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas APBD. Realisasi anggaran yang rendah pada periode berjalan dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam proses perencanaan, pengadaan, maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya keterlambatan penyerapan anggaran yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan anggaran yang ditetapkan dengan kemampuan implementasi di lapangan (Rinaldi & Hasibuan, 2024).

Permasalahan efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak dapat dilepaskan dari beban fiskal yang bersumber dari tahun anggaran sebelumnya. Adanya tunda bayar yang berasal dari pelaksanaan APBD Tahun 2024 memberikan tekanan tambahan terhadap kapasitas fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2025. Beban tersebut berimplikasi pada berkurangnya fleksibilitas anggaran untuk membiayai program prioritas baru, sehingga APBD lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu dibandingkan untuk mendorong agenda pembangunan yang bersifat progresif dan berkelanjutan.

Dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, pengelolaan APBD harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Ketidakseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan serta rendahnya ketercapaian output program menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas APBD tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan kebijakan publik. (Suhendro, 2024)

Berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa dominasi belanja operasional sering kali menjadi penghambat utama bagi optimalisasi peran APBD sebagai instrumen pembangunan. Ketika sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan administratif pemerintahan, maka kapasitas APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi terbatas. Kondisi ini menuntut adanya pergeseran paradigma pengelolaan anggaran dari sekadar berbasis input menuju penganggaran berbasis kinerja yang menekankan pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran

2025 secara komprehensif. Penelitian ini difokuskan pada analisis struktur belanja, tingkat realisasi anggaran, serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, berorientasi pada hasil, dan berpihak pada kepentingan publik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dan evaluatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik pengelolaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data realisasi anggaran dan kondisi faktual yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai struktur APBD, tingkat realisasi anggaran, serta permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, penelitian ini juga bersifat evaluatif, karena menilai sejauh mana APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 telah memenuhi prinsip efektivitas sebagai instrumen pembangunan daerah, khususnya dalam kaitannya dengan alokasi belanja, realisasi program, dan pencapaian tujuan pembangunan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi pemerintah daerah, seperti Dokumen APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dan laporan realisasi anggaran. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, antara lain data publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, literatur ilmiah, jurnal, serta pemberitaan media massa yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah data APBD, realisasi anggaran, serta dokumen perencanaan dan kebijakan fiskal daerah. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas efektivitas anggaran, pengelolaan keuangan daerah, serta penganggaran berbasis kinerja, guna memperkuat kerangka teoritis dan analitis penelitian (Maris, 2022). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara menginterpretasikan data anggaran dan realisasi belanja daerah untuk menilai tingkat efektivitas APBD. Analisis dilakukan melalui perbandingan antara target dan realisasi anggaran, pengkajian komposisi belanja daerah terutama antara belanja operasional dan belanja modal serta penilaian implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara



---

sistematis untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi peningkatan efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi di masa mendatang (Yusuf, n.d.).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai instrumen fiskal utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi juga sebagai representasi arah kebijakan publik pemerintah daerah. Oleh karena itu, efektivitas APBD menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan fiskal yang operasional dan berdampak nyata. Berdasarkan data APBD dan realisasi anggaran yang dipublikasikan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dapat dilihat bahwa pengelolaan APBD Kuantan Singingi Tahun 2025 masih menghadapi tantangan struktural yang memengaruhi kinerjanya sebagai instrumen pembangunan.

Dari sisi pendapatan daerah, struktur APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional. Kondisi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merancang kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketika terjadi keterlambatan atau penyesuaian transfer pusat, maka stabilitas APBD daerah ikut terganggu. Ketergantungan tersebut juga mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan (Priyani, 2025).

Struktur belanja daerah dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 memperlihatkan dominasi belanja operasional, khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai menyerap porsi anggaran yang sangat besar sebagai konsekuensi dari kebutuhan pembiayaan aparatur sipil negara dan struktur birokrasi pemerintahan daerah. Di sisi lain, belanja barang dan jasa juga mengambil porsi signifikan untuk mendukung operasional perangkat daerah. Pola ini menunjukkan bahwa orientasi belanja APBD masih bertumpu pada pemeliharaan fungsi administratif pemerintahan, bukan pada penguatan kapasitas pembangunan jangka panjang.

Dominasi belanja operasional tersebut menunjukkan bahwa APBD belum sepenuhnya difungsikan sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada hasil. Ketika belanja rutin menyerap sebagian besar anggaran, maka ruang fiskal untuk membiayai program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat menjadi semakin sempit. Hal ini mencerminkan masih kuatnya pendekatan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana keberlangsungan birokrasi lebih diprioritaskan dibandingkan pencapaian outcome pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

Selain struktur belanja, tingkat realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan APBD. Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, tingkat penyerapan belanja Kabupaten Kuantan Singingi pada periode berjalan masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Rendahnya realisasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan anggaran dan kemampuan implementasi di lapangan. Akibatnya, banyak program dan kegiatan yang belum berjalan optimal sesuai jadwal yang direncanakan.

Keterlambatan realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari lemahnya kualitas perencanaan anggaran. Perencanaan yang kurang matang sering kali menyebabkan perubahan kegiatan, revisi anggaran, serta keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini berdampak pada menumpuknya realisasi anggaran di akhir tahun, yang berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan mengurangi efektivitas belanja daerah. Dengan demikian, rendahnya realisasi anggaran mencerminkan persoalan struktural dalam siklus pengelolaan APBD (Nursela, Taufik, & Yasni, 2022).

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya realisasi anggaran adalah keterbatasan kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta kompleksitas prosedur administrasi menjadi hambatan dalam percepatan pelaksanaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas APBD tidak hanya ditentukan oleh kebijakan anggaran, tetapi juga oleh kesiapan institusional pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran secara efektif.

Permasalahan efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 semakin kompleks dengan adanya beban fiskal berupa tunda bayar yang berasal dari APBD Tahun 2024. Kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya harus ditanggung dalam APBD tahun berjalan, sehingga mengurangi kapasitas fiskal untuk membiayai program prioritas baru. Beban ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja pada tahun-tahun sebelumnya yang berdampak berkelanjutan.

Keberadaan tunda bayar tersebut menunjukkan lemahnya disiplin fiskal dan perencanaan keuangan daerah. Ketika belanja tidak sepenuhnya didukung oleh kemampuan pendapatan yang realistis, maka risiko defisit dan akumulasi kewajiban menjadi sulit dihindari. Dalam konteks ini, efektivitas APBD tidak hanya diukur dari capaian tahunan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang (Srisaparmi et al., 2025).

Dari perspektif penganggaran berbasis kinerja, efektivitas APBD seharusnya tercermin dari keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran dan capaian output serta outcome program. Namun, dalam praktik APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, keterkaitan tersebut masih relatif lemah. Banyak program dan kegiatan yang belum memiliki indikator kinerja yang terukur secara jelas, sehingga sulit untuk menilai manfaat nyata dari anggaran yang telah direalisasikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penganggaran masih cenderung bersifat incremental, yaitu mengacu pada pola anggaran tahun

sebelumnya tanpa evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja. Akibatnya, belanja daerah bersifat rutin dan berulang, sementara inovasi kebijakan dan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan efektivitas APBD.

Aspek pengawasan anggaran juga memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas APBD. Pengawasan yang belum optimal dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran belanja dan rendahnya kualitas pelaksanaan program. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, dinamika pembahasan APBD dan laporan pertanggungjawaban anggaran menunjukkan bahwa fungsi pengawasan legislatif masih perlu diperkuat agar pengelolaan APBD lebih akuntabel dan transparan (Simangunsong & Irham, 2022).

Dari sisi tata kelola pemerintahan, efektivitas APBD juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat untuk memahami arah kebijakan fiskal daerah dan mengawasi pelaksanaannya. Namun, ketika APBD lebih banyak terserap untuk belanja rutin dan penyelesaian kewajiban masa lalu, maka manfaat langsung APBD bagi masyarakat menjadi kurang terasa.

Kondisi tersebut berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. APBD yang tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, efektivitas APBD memiliki implikasi sosial dan politik yang luas, tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan keuangan (Malinda, Lampang, Abshar, & Ramadhan, 2024).

Dalam perspektif pembangunan daerah, keterbatasan belanja modal dan rendahnya efektivitas realisasi anggaran berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan dikelola secara efektif. Ketika APBD tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka pembangunan daerah berjalan kurang optimal (Fadilah & Andriani, 2025).

Permasalahan efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 juga mencerminkan tantangan umum yang dihadapi banyak daerah otonom di Indonesia. Ketergantungan pada transfer pusat, dominasi belanja operasional, serta lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran merupakan persoalan struktural yang membutuhkan solusi kebijakan yang komprehensif.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas APBD harus dilakukan melalui reformasi menyeluruh dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Reformasi ini menuntut perubahan paradigma dari sekadar pemenuhan administrasi menuju penganggaran yang berorientasi pada hasil dan manfaat publik.

Selain aspek teknis, peningkatan efektivitas APBD juga memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah dan DPRD. Penetapan prioritas belanja harus benar-benar diarahkan pada kepentingan publik dan pembangunan daerah jangka panjang, bukan sekadar hasil kompromi politik jangka pendek.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pembangunan daerah. Meskipun secara normatif telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun secara substansi dan implementasi masih terdapat berbagai persoalan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur, realisasi, dan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa efektivitas APBD sebagai instrumen pembangunan daerah masih belum optimal. APBD cenderung didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sementara alokasi belanja modal yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat relatif terbatas, sehingga APBD lebih berfungsi sebagai instrumen administratif pemerintahan dibandingkan sebagai alat strategis pembangunan. Rendahnya tingkat realisasi anggaran pada periode berjalan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh lemahnya kualitas perencanaan, keterbatasan kapasitas perangkat daerah, serta hambatan administratif dalam proses pelaksanaan kegiatan, yang kemudian diperparah oleh adanya beban fiskal berupa tunda bayar dari tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah melakukan penataan kembali struktur belanja dengan memperkuat proporsi belanja modal yang berdampak langsung terhadap masyarakat, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui indikator output dan outcome yang terukur, serta memperkuat fungsi pengawasan dan transparansi pengelolaan APBD guna menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan fiskal daerah, sehingga APBD ke depan dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan publik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderas. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 179–198.
- Malinda, O., Lampang, M. A., Abshar, M., & Ramadhan, N. (2024). *Mengungkap Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Pengelolaan Pad Dan Apbd Di Kalimantan Tengah*. 6(2), 209–219.
- Maris, M. (2022). Ekonomi Politik Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 133–147.
- Nursela, N., Taufik, T., & Yasni, H. (2022). Perencanaaanggaran, Kualitas Sumberi Dayai Manusia, Pelaksanaani Anggaranani Dan Komitmeni Organisasi Pada Penyerapan Anggaran. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 11–23.



- 
- Priyani, R. S. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 6(2), 641–656.
- Rinaldi, R., & Hasibuan, A. P. (2024). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021 - 2023. 2(2).
- Simangunsong, A., & Irham, M. (2022). Analisis Fungsi Dan Peran Dprd Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah ISSN*;, 7(4), 1269–1284. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13807>
- Srisaparmi, Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18395–18404.
- Suhendro, S. (2024). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 29(2). <https://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2574>
- Sutrisno, D., Perawati, S., Mariska, R. P., Aliyah, S. H., & Andriani, L. (2024). Edukasi Pembuatan Obat Luka Berbasis Bahan Alam. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 6(1), 104–111. <https://doi.org/10.36565/jak.v6i1.667>
- Yusuf, C. (n.d.). Dampak Pemisahan Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Menginterpretasikan Undang-undang Dan Peraturan Di Bawahnya. 2022, 37(2), 85–100.